

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|--|---------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIP SKRIPSI | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH | xvii |
| ABSTRAK..... | xviii |
| ABSTRACT | xix |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 13 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN | 14 |
| A. Studi Kepustakaan..... | 14 |
| B. Kerangka Pikiran..... | 40 |
| C. Konsep Operasional..... | 42 |
| D. Operasional Variabel..... | 43 |
| E. Teknik Pengukuran..... | 45 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 48 |
| A. Tipe Penelitian..... | 48 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 48 |
| C. Populasi dan Sampel..... | 49 |
| D. Teknik Penarikan Sampel..... | 50 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 50 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 51 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 52 |
| H. Jadwal dan Waktu Penelitian..... | 52 |
| BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN | 54 |
| A. Sejarah Terbentuknya Desa Tanjung Medan..... | 54 |
| B. Keadaan Geografis..... | 54 |
| C. Keadaan penduduk..... | 55 |
| D. Pendidikan..... | 55 |
| E. Mata Pencaharian..... | 56 |
| F. Pemerintahan Desa..... | 56 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 64 |
| A. Identitas Responden..... | 64 |
| B. Hasil Pembahasan penelitian..... | 68 |
| C. Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi..... | 101 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| BAB VI PENUTUP..... | 103 |
| A. Kesimpulan..... | 103 |
| B. Saran..... | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 105 |



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. 1. Kondisi Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Medan | 9 |
| 1. 2. Kondisi kesehatan Masyarakat Desa Tanjung Medan..... | 9 |
| 1. 3. Kondisi Kehidupan Sosial dan Budaya Desa Tanjung Medan..... | 10 |
| II. I. Kriteria Evaluasi..... | 30 |
| II.III. Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi | 44 |
| III.I. Keadaan Populasi dan Sampel Penelitian | 49 |
| III.2. Jadwal dan Waktu Penelitian..... | 53 |
| IV.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin..... | 55 |
| IV.2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan | 55 |
| VI.3. Jumlah Pemerintahan Desa Tanjung Medan..... | 56 |
| V. 1. Distribusi Jenis Kelamin Responden Pemerintah Desa..... | 65 |
| V. 2. Distribusi Jenis Kelamin Responden Masyarakat Desa Tanjung Medan | 65 |
| V. 3. Distribusi Responden Penelitian Pemerintah Desa berdasarkan Umur... | 65 |
| V.4. Distribusi Responden Penelitian Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Umur | 66 |
| V.5. Distribusi Responden Pemerintah Desa Tanjung Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 67 |
| V.6. Distribusi Responden Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 67 |

| | |
|--|----|
| V.7. Distribusi Jawaban Responden Pemerintah Desa Tanjung Medan Mengenai Efektivitas | 70 |
| V.8. Distribusi Jawaban Responden Masyarakat dan Ketua RT/RW Desa Tanjung Medan Mengenai Efektivitas | 71 |
| V.9. Distribusi Jawaban Responden Pemerintah Desa Tanjung Medan Mengenai Efisiensi..... | 74 |
| V.10.Distribusi Jawaban Responden Masyarakat dan Ketua RT/RW Desa Tanjung Mengenai Efisiensi..... | 75 |
| V.11.Distribusi Jawaban Responden Pemerintah Desa Tanjung Mengenai Kecukupan | 78 |
| V.12.Distribusi Jawaban Responden Masyarakat dan Ketua RT/RW Tanjung Medan Mengenai Kecukupan | 80 |
| V.13.Distribusi Jawaban Responden Pemerintah Desa Tanjung Medan Mengenai Perataan..... | 82 |
| V.14.Distribusi Jawaban Responden Masyarakat dan Ketua RT/RW Desa Tanjung Medan Mengenai Perataan..... | 84 |
| V.15.Distribusi jawaban Responden Pemerintah Desa Tanjung Medan Mengenai Responsivitas | 87 |
| V.16.Distribusi Jawaban Responden Masyarakat dan Ketua RT/RW Desa Tanjung Medan Mengenai Responsivitas | 89 |
| V.17.Distribusi Jawaban Responden Pemerintah Desa Tanjung Medan Mengenai Ketepatan | 91 |
| V.18.Distribusi Jawaban Responden Masyarakat dan Ketua RT/RW Desa Tanjung Medan Mengenai Ketepatan | 94 |

| | |
|--|----|
| V.19.Rekapitulasi Jawaban Responden Pemerintah Desa Tanjung Medan Tentang Evaluasi pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi | 96 |
| V.20.Rekapitulasi jawaban Responden Pemerintah dan Ketua RT/RW Tentang Evalausi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa diDesa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi | 98 |



DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| II.I. Kerangka Pikiran Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi | 41 |
| IV.I. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Medan..... | 57 |
| IV.2. Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tanjung Medan | 63 |



EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPALA DESA
DALAM MEMBINA KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA DI DESA
TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

OLEH

RIKO RIKARDO

ABSTRAK

Kata kunci : Evaluasi Kewenangan Kepala Desa, Membina Masyarakat Desa

Evaluasi sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. Pemerintahan Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam Negara Republik Indonesia yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan sendiri dan dipimpin oleh Kepala Desa. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana pada Pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Kepala Desa berwenang membina kehidupan masyarakat Desa khususnya di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi. Masih terdapatnya permasalahan mengenai pelaksanaan pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa antara lain, Kepala Desa kurang Efektif memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat Desa sehingga rendahnya respon masyarakat dalam pembinaan dan bimbingan yang dilakukan Kepala Desa terhadap kehidupan masyarakat Desa, belum terciptanya kerja sama yang baik antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa, rendahnya sarana dan prasarana kesehatan di Desa, masih kurangnya pengawasan yang dilakukan Kepala Desa terhadap masyarakat Desa. Adapun jenis penelitian ini adalah survey deskriptif yang mana penulis ingin menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya untuk mengumpulkan data penulis menggunakan Kuesioner, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi sebagai alat pengumpul data penelitian. Setelah dilakukan pengolahan data yang berasal dari Pemerintahan Desa, RT/RW dan Masyarakat Desa dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa dalam kategori “ Cukup Baik ”. Dengan kesimpulan pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dinilai dari indikator Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan dinilai masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih ada kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa sehingga dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa masih belum Efektif.

EVALUATION OF THE IMAGE OF THE HEAD OF THE VILLAGE
IN MAKING LIFE OF THE VILLAGE COMMUNITY IN TANJUNG
VILLAGE MEDAN SUBDISTRICT CERENTI OF KUANTAN
SINGINGI REGENCY

BY

RIKO RIKARDO

ABSTRACT

Keyword : Evaluation of Village Head's Authority, Fostering Village Community

Evaluations as a process to know/test wheter an activity, process activitiess, output of a program in accordance with objectives or criteria that have been determined. Village Government is the smallest form of government within the Republic of Indonesia which can be said to have self-government and is headed by the Village Head. In law No. 6 Year 2014 on the Village, where in Article 26 the Village Head is in charge of organizing the Village Government, implementing the Village Depelopment, Village Community Depelopment, Village Community Empowerment and Village Head are authorized to foster the life of the village community, especially in Tanjung Medan Village Cerenti Regency Kuantan Singingi. There are still problem regarding the implementation of teh implementation of the authority of the Village Head in fostering the life of the village community, among others, the Village Head is less Effective to porvide guidance and guidance to the Village community so that the low response of the community in guidance and guidance by the Village Head to the village community life, The lack of good cooperation beetwen the Village Head and the Village community institution, the law number of health facilities and infrasstructure in the village, is still lack of suverpision by the Village Head to the Village community. The type of this research is descriptive survey which the writer wants to describe how the Implementation of authority of Village Head in developing the life of the village community in the village of Tanjung Medan Cerenti Sub-district Kuantan Singingi, furthermore to collect the data of the writer using Questionnaire, Interview, Observation and Documentation as data collecting tool of research. After processing data from the village Government, RT/RW and the Village Community can be concluded that the implementation of the authority of the village Head in fostering the life of the village community in the category of "Good Enough". With the conclusion of the Implementation of the authority of the Village Head is assessed from the indicator of Effectiveness, Efficiency, Sufficiency, Alignment, Responsiveness, Accuracy is still considered not effective, this is because there are still obstacles faced by the Village Head so that in the implemetation of the authority of the Village Head in fostering the lives of village communities is still not effective.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan swasta yang mana dalam suatu Negara, peran ketiganya tentunya sangatlah penting dalam menjalankan suatu Negara, khususnya pemerintah Indonesia sebagai institusi yang memiliki kekuasaan serta mempunyai tujuan yang harus dicapai yang mana tujuan Negara Indonesia meliputi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat.

Untuk mencapai tujuan Negara dibentuk Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Maka pemerintah sebagai institusi yang memiliki fungsi pengaturan dan pelayanan tentunya dalam hal itu pemerintah dapat membuat peraturan kebijakan untuk mencapai tujuan Negara dan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga berfungsi untuk menjalankan kehidupan didalam suatu negara yang mana fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan.

Pemerintah menurut W.S. Syre (dalam Syafiie 2011 : 9) adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Dalam menjalankan perannya, pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai peran hampir sama dapat memberikan peraturan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan.

Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam membuat peraturan yang berlaku secara keseluruhan dan pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah dengan pertimbangan peraturan yang di atur oleh pemerintah pusat. Maksud dari penjelasan tersebut pemerintah daerah berhak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri tetapi dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri pemerintah daerah tidak boleh bertentangan peraturannya dengan pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta Kepala Desa terhadap masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kata lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah perlu dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya adalah, Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Dengan demikian bahwa urusan pemerintah pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum, pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat disemua daerah oleh sebab itu, Hal-hal mengenai urusan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mandiri dan mampu memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah.

Negara Indonesia terdiri dari wilayah yang meliputi Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang mana seluruh bentuk dari wilayah ini merupakan sub bagian dari Negara Indonesia yang saling terintegrasi dan berkerjasama untuk mencapai tujuan Negara Indonesia. Daerah terkecil yang memiliki bentuk pemerintahan sendiri yaitu Desa.

Desa Tanjung Medan Merupakan Sebuah Desa yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya berada di Kecamatan Cerenti. Desa Tanjung Medan merupakan sebuah Desa yang dibentuk pada Tahun 2004, terdiri dari tiga Dusun serta yang berbatasan langsung dengan Desa-Desa yang ada di Kecamatan Cerenti dan yang dipimpin oleh Kepala Desa yang langsung dipilih oleh masyarakat Desa, adapun jumlah Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 15 yang terdiri dari Kecamatan Kuantan Tengah, Benai, Pangean, Logas Tanah Darat, Kuantan Hilir Seberang, Inuman, Cerenti, Gunung Toar, Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Pucuk Rantau, Singingi, Singingi Hilir dan Sentajo raya.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 371 mengatakan :

- a. Dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa
- b. Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan mengenai desa.

Salah satu kekhususan Desa adalah dapat membuat peraturan Desa yang disebut perdes, memiliki lembaga Legislatif yang disebut BPD. Pencapaian tujuan organisasi khususnya Desa tidak akan tercapai tanpa pelaksanaan tugas dan fungsi dari pemerintah desa dalam peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas harian dan pencapaian Visi dan Misi Desa. Kewenangan Desa dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 18 sampai dengan 19 yang mana kewenangan Desa meliputi: kewenangan Desa meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, Provinsi atau pemerintah Dearah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 :

- a. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembanguna Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemeberdayaan masyarakat Desa;
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
 - d. Menetapkan peraturan Desa;
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentrman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna menignkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Pasal 3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
 - d. Memeberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Maksud dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 ialah kewenangan berdasarkan kewenangan kepala desa dalam membina masyarakat serta mengembangkan kehidupan sosial dan budaya yang ada di desa, kepala Desa merupakan representasi pemerintah Desa. Ia menjadi aktor penting dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab kepala desa di atur dalam Undang-Undang desa. Semangat Undang-Undang desa menempatkan kepala desa bukan kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Kepala desa harus mengakar dengan masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tugas kepala desa bukan

sekedar menyelenggarakan pemerintahan Desa, tetapi juga melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa.

Sehubungan dengan ketentuan hukum tersebut maka pemerintah Desa telah mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Khususnya di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang mana dalam pencapaian tujuan organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang mana dalam peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 Tentang pedoman susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pasal 9 Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagian peraturan Desa;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- d. Memeberdayakan masyarakat dan kelembagaan Desa;
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa;

- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Memakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum;
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan;
- i. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipasif.

Dari penjelasan kewenangan Kepala Desa diatas salah satu kewenangan kepala Desa adalah membina kehidupan Desa. Dalam membina kehidupan Desa, kepala Desa mempunyai wewenang bekerja sama dengan BPD dalam membuat peraturan Desa yang berhubungan dengan pembinaan kehidupan masyarakat Desa. Maka dari itu peran kepala Desa menjadi hal yang penting dalam pembangunan khususnya pembinaan kehidupan Desa pada beberapa aspek, meliputi, Agama, pendidikan, kesehatan, budaya dan kehidupan sosial.

Pembinaan menurut Efendi (2003:24) adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk didalam bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Terlihat pentingnya usaha pembinaan yang dilakukan untuk lebih meningkatkan kemampuan bawahan atau masyarakat di suatu Desa dengan memberikan bimbingan dan pendidikan menuju kondisi organisasi yaitu Desa kearah yang lebih baik. Tujuan pembinaan meliputi, mengkoordinasi kegiatan, memelihara hubungan antar individu, dapat menyalurkan ide dan saran yang dimiliki oleh pemimpin dapat meningkatkan kemampuan masyarakat.

Dari pengertian mengenai pembinaan diatas terlihat bahwa tugas kepala Desa dalam melakukan pembinaan mempunyai tujuan memberikan pengetahuan dalam rangka perbaikan kondisi masyarakat Desa khususnya masyarakat Desa Tanjung Medan yang mana dalam pelaksanaan pembinaan secara keseluruhan Kepala Desa melakukan bimbingan kepada masyarakat serta pengawasan terhadap kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa dimana kepala Desa berwenang.

Salah satu bentuk kehidupan masyarakat Desa adalah aspek kehidupan dibidang pendidikan yaitu kondisi pendidikan, maka dapat dilihat bagaimana kondisi kehidupan masyarakat Tanjung Medan dalam bidang pendidikan pada tabel dibawah ini:

Tabel. I. 1. Kondisi Tingkat Pendidikan di Desa Tanjung Medan

| No | Uraian status | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1 | Penduduk yang buta aksara | 36 |
| 2 | Penduduk tamat pendidikan dasar | 682 |
| 3 | Penduduk tamat SLTP | 262 |
| 4 | Penduduk tamat SMA | 147 |
| 5 | Penduduk yang tidak sekolah | 125 |

Sumber: kantor Kepala Desa Tanjung Medan 2016

Dari tabel diatas terlihat masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tanjung Medan sehingga perlu dilakukan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang pendidikan, selanjutnya kondisi kesehatan masyarakat Desa Tanjung Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. I. 2. Kondisi Kesehatan Masyarakat Desa Tanjung Medan

| No | Uraian status | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Perkembangan jumlah kegiatan posyandu | 3 |
| 2 | Perkembangan jumlah kesehatan prasarana dan sarana dari tahun ke tahun | 2 |
| 3 | Jumlah tenaga kesehatan | 6 |
| 4 | Perkembangan kegiatan pogging | - |

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medan 2016

Dari data diatas terlihat bahwa keadaan kesehatan masyarakat Desa Tanjung Medan masih tergolong kurang baik karena masih adanya kegiatan yang tidak dilakukan oleh kepala desa terlihat pada tabel di atas tidak adanya kegiatan pogging oleh pemerintah Desa dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah desa serta kurangnya perkembangan jumlah kegiatan dibidang posyandu dan tenaga kesehatan yang masih kurang jumlahnya, selanjutnya mengenai aspek sosial dan budaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.3. Kondisi Kehidupan Sosial dan Budaya Desa Tanjung Medan

| No | Uraian status | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Rumah adat Desa | - |
| 2 | Jumlah lembaga kemasyarakatan | 3 |
| 3 | Jumlah anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan yang hadir dalam musrenbangdes | 50 |
| 4 | Pengadaan acara adat/kebudayaan | - |

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Medan 2016

Dari data diatas terlihat masih kurangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Tanjung Medan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat Desa, tidak adanya pengadaan acara kebudayaan untuk

melestarikan kebudayaan Desa dan tidak adanya rumah adat Desa di Desa Tanjung Medan, sehingga dari seluruh penjelasan aspek kehidupan masyarakat Desa diperlukan pembinaan dan kewenangan dari kepala Desa Tanjung Medan, maka dari itu apabila pembinaan kehidupan masyarakat Desa dilakukan dengan baik maka kehidupan masyarakat Desa akan menjadi semakin baik, maju serta dapat melestarikan adat istiadat.

Dari penjelasan di atas terlihat masih adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa, sehingga dapat di kongretkan fenomena yang masih terjadi yang meliputi:

1. Kepala Desa terindikasi kurang Efektif memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap masyarakat Desa sehingga Masih rendahnya respon masyarakat Desa dalam pembinaan dan bimbingan yang dilakukan Kepala Desa terhadap kehidupan masyarakat Desa.
2. Belum terciptanya kerja sama yang baik antara kepala Desa dengan lembaga kemasyarakatan Desa, sehingga kepala Desa tidak efektif dalam melakukan pengadaan acara adat/kebudayaan dalam pelestarian kebudayaan Desa dan terlihat selama ini Kepala desa kurang melibatkan kelembagan masyarakat dalam pembinaan pelestarian adat/kebudayaan masyarakat Desa.
3. Terindikasi masih rendahnya tingkat kesehatan masyarakat dan sarana serta prasarana kesehatan di Desa Tanjung Medan, terlihat masih banyaknya kegiatan yang belum ada seperti pogging serta

perkembangan jumlah kegiatan di bidang kesehatan yang belum maksimal.

4. Terindikasi kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap keadaan kehidupan masyarakat Desa Tanjung Medan yang masih membutuhkan bimbingan dari pemerintah Desa.

Dari latar belakang yang telah diuraikan dan permasalahan yang dikemukakan pada fenomena diatas terlihat masih kurangnya pelaksanaan kewenangan kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa Tanjung Medan dan masih adanya masyarakat yang memerlukan bimbingan dari pemerintahan desa khususnya dari kepala desa, sehingga dari latar belakang dan fenomena tersebut peneliti ingin menilai pelaksanaan dan melakukan penelitian mengenai kewenangan kepala Desa, dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas mengenai masih kurang baiknya pelaksanaan kewenangan pemerintah Desa khususnya kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa Tanjung Medan, di bidang Agama, Pendidikan, Kesehatan, dan Budaya dan kehidupan sosial maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut **“ Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan Masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai bahan penengembangan ilmu pemerintahan terutama dibidang penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepala Desa.
2. Sebagai referensi untuk mahasiswa lain dan kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dalam ini dimasa yang akan datang.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada kepala Desa dan pemerintahan Desa serta sebagai pedoman serta acuan didalam melaksanakan kewenangannya khususnya dalam membina kehidupan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dilakukan dengan survey yang mana menggunakan metode kuantitatif di karenakan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian berupa pembahasan mengenai fenomena yang telah di jelaskan pada latar belakang

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini ialah berada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, adapun pemilihan lokasi penelitian di Desa Tanjung Medan ialah dikarenakan menurut Data yang dapat mengenai kehidupan masyarakat Desa terlihat masih terdapat permasalahan dan peran Kepala Desa yang terlihat kurang terlaksana dengan baik.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun dalam hal ini yang memembedakan adalah, menurut Usman dan Akbar (2011: 42) menyatakan, populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Maka populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta masyarakat Tanjung Medan.

Sedangkan sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Akbar, 2011: 43), yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, anggota BPD dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.I : Populasi Dan Sampel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

| No. | Nama Populasi | populasi | Sampel | % |
|--------|----------------------------|----------|--------|-------|
| 1 | Kepala Desa | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Kaur Pemerintahan | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Kaur Pembangunan | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Kaur Umum | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Kadus | 3 | 3 | 100% |
| 7 | Badan Permusyawaratan Desa | 5 | 5 | 100% |
| 8 | Masyarakat Desa | 1252 | 50 | 3,99% |
| Jumlah | | 1265 | 63 | 4,98% |

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan sampel penelitian ini ialah berjumlah 63 orang yang mana terdiri dari pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan dua jenis teknik sampling yaitu sensus dan purposive.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini digunakan 2 teknik yaitu sensus yaitu sensus yaitu mengambil keseluruhan populasi yang ada dikarenakan jumlah populasi yang dimiliki pada pemerintahan. Desa tergolong kecil yaitu pernagkat Desa hanya berjumlah 13 orang termasuk anggota BPD yang berjumlah 5 orang, selanjutnya teknik purposive merupakan teknik penarikan berdasarkan tujuan dan alasan tertentu, peneliti mengambil dan membatasi sampel masyarakat sebanyak 50 yang mana dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan mengetahui tentang permasalahan penelitian, sehingga jumlah keseluruhan sampel berjumlah 63 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer.

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kusioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Data sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenan dengan kegiatan pembinaan masyarakat pada Desa Tanjung Medan, penejelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memebrikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

2. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga peneliti dapat menilai terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam pembinaan kehidupan masyarakat

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui buku-buku, dokumen-dokumen, dan catatan – catatan yang ada Kantor kepala desa Tanjung medan kecamatan cerenti yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan penulis.

4. Wawancara

Wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk

memperoleh data mengenai masalah penelitian ini yang mana wawancara ini dilakukan kepada Kepala Desa

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipresentasikan untuk dianalisa secara *deskriptif kuantitatif* sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa serta di Desa Tanjung Medan yang mana penelitian akan memakan waktu beberapa bulan, dimulai bulan Mei s/d selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian dibawah ini:

Tabel III. 2. Jadwal dan waktu Penelitian

| No | Keterangan | Tahun/Bulan/Minggu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| | | Juni | | | | Desember 2016 | | | | Mei 2017 | | | | Agustus | | | | | Desember | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyusunan Proposal | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Perbaikan Proposal | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penunjukan Pembimbing | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Proposal | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ujian UP | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Revisi Proposal | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Quesioner | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Rekomendasi | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| 10 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | |
| 11 | Perbaikan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | |
| 12 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 13 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dilakukan dengan survey yang mana menggunakan metode kuantitatif di karenakan menggunakan angket sebagai alat pengumpul data. Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian berupa pembahasan mengenai fenomena yang telah di jelaskan pada latar belakang

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini ialah berada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, adapun pemilihan lokasi penelitian di Desa Tanjung Medan ialah dikarenakan menurut Data yang dapat mengenai kehidupan masyarakat Desa terlihat masih terdapat permasalahan dan peran Kepala Desa yang terlihat kurang terlaksana dengan baik.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun dalam hal ini yang membedakan adalah, menurut Usman dan Akbar (2011: 42) menyatakan, populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Maka populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pemerintah Desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta masyarakat Tanjung Medan.

Sedangkan sampel ialah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Akbar, 2011: 43), yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, anggota BPD dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.I : Populasi Dan Sampel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

| No. | Nama Populasi | populasi | Sampel | % |
|--------|----------------------------|----------|--------|-------|
| 1 | Kepala Desa | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Kaur Pemerintahan | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Kaur Pembangunan | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Kaur Umum | 1 | 1 | 100% |
| 6 | Kadus | 3 | 3 | 100% |
| 7 | Badan Permusyawaratan Desa | 5 | 5 | 100% |
| 8 | Masyarakat Desa | 1252 | 50 | 3,99% |
| Jumlah | | 1265 | 63 | 4,98% |

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2016

Dari tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan sampel penelitian ini ialah berjumlah 63 orang yang mana terdiri dari pemerintahan Desa dan masyarakat Desa. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan dua jenis teknik sampling yaitu sensus dan purposive.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini digunakan 2 teknik yaitu sensus yaitu sensus yaitu mengambil keseluruhan populasi yang ada dikarenakan jumlah populasi yang dimiliki pada pemerintahan. Desa tergolong kecil yaitu pernagkat Desa hanya berjumlah 13 orang termasuk anggota BPD yang berjumlah 5 orang, selanjutnya teknik purposive merupakan teknik penarikan berdasarkan tujuan dan alasan tertentu, peneliti mengambil dan membatasi sampel masyarakat sebanyak 50 yang mana dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan mengetahui tentang permasalahan penelitian, sehingga jumlah keseluruhan sampel berjumlah 63 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer.

Yaitu data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara dan pedoman kusioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Data sekunder

Yaitu data pendukung yang berkenan dengan kegiatan pembinaan masyarakat pada Desa Tanjung Medan, penejelasan umum, teori-teori dan dokumentasi yang relevan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memebrikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

2. Observasi

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti sehingga peneliti dapat menilai terhadap Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa dalam pembinaan kehidupan masyarakat

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui buku-buku, dokumen-dokumen, dan catatan – catatan yang ada Kantor kepala desa Tanjung medan kecamatan cerenti yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan penulis.

4. Wawancara

Wawancara langsung yang peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk

memperoleh data mengenai masalah penelitian ini yang mana wawancara ini dilakukan kepada Kepala Desa

G. Teknik Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dalam penelitian lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan bahan masukan dalam penelitian ini. Kemudian data tersebut diolah, dipresentasikan untuk dianalisa secara *deskriptif kuantitatif* sesuai dengan data yang ada guna dilakukan analisa kuantitatif dalam bentuk persentase dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dan pemberian saran.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa serta di Desa Tanjung Medan yang mana penelitian akan memakan waktu beberapa bulan, dimulai bulan Mei s/d selesai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel jadwal penelitian dibawah ini:

Tabel III. 2. Jadwal dan waktu Penelitian

| No | Keterangan | Tahun/Bulan/Minggu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| | | Juni | | | | Desember 2016 | | | | Mei 2017 | | | | Agustus | | | | | Desember | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penyusunan Proposal | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Perbaikan Proposal | | | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Penunjukan Pembimbing | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Proposal | | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ujian UP | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Revisi Proposal | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Quesioner | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Rekomendasi | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Penelitian Lapangan | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | | |
| 10 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | | | | | |
| 11 | Perbaikan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | | |
| 12 | Ujian Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 13 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | |

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Terbentuknya Desa Tanjung Medan

Sejarah Desa Tanjung Medan asal mulanya berdiri pada tahun 2004 yang merupakan pemekaran atau pecahan dari Desa Sikakak, secara resmi Desa Tanjung Medan berdiri pada tahun 2004 dimana pelantikan Kepala desanya pada Bulan Desember 2004.

Sebelum terbentuknya Desa Tanjung Medan, Desa Tanjung Medan merupakan sebuah dusun III dari Desa Sikakak, maka akhirnya pada tahun 2004 terjadilah pemekaran pada Desa Tanjung Medan, Desa Tanjung Medan berada di kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

B. Keadaan Geografis

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cerenti yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang secara geomorfologi Desa Tanjung Medan merupakan wilayah daratan dan merupakan daerah aliran sungai (DAS), sungai yang terdapat di Desa Tanjung Medan yakni Sungai Kuantan yang mengalir ke sungai Indragiri. Sungai dimanfaatkan masyarakat untuk pemandian, mencari ikan dan usaha penggalian pasir.

Batas – batas Desa Tanjung Medan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kompe Berangin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sikakak
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sikakak
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman.

Luas wilayah Desa Tanjung Medan sekitar \pm 1200 Ha, secara administratif wilayah Desa Tanjung Medan terbagi dalam 3 wilayah Dusun, 6 Rukun Warga (RW)

dan 12 Rukun Tetangga (RT). Desa Tanjung Medan beriklim Tropis temperatur suhu Udara rata-rata 20-35 C. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan \pm 3.5 Km, jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten \pm 60 Km, ke Ibu Kota Provinsi \pm 230 km.

C. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data administrasi desa, jumlah Penduduk Desa Tanjung Medan 1265 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

| No | Jenis Kelamin | Jumlah |
|--------|---------------|--------|
| 1 | Laki-laki | 598 |
| 2 | Perempuan | 667 |
| Jumlah | | 1265 |

Sumber : *Kantor Kepala Desa Tanjung Medan 2017*

D. Pendidikan

Berdasarkan data administrasi Desa, jumlah penduduk Desa Tanjung Medan berdasarkan menurut jenis tingkat pendidikan adalah Tamat SD, Tamat SMP, tamat SMA, dan tamat Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pendidikan Desa Tanjung Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2. Jumlah penduduk menurut jenis pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|--------|------------------|--------|------------|
| 1 | Tamat SD | 436 | 51,05% |
| 2 | Tamat SMP | 170 | 19,90 % |
| 3 | Tamat SMA | 162 | 18,96 % |
| 4 | Perguruan TInggi | 86 | 10,07 % |
| Jumlah | | 854 | 100% |

Sumber : *Kantor Kepala Desa Tanjung Medan 2017*

Berdasarkan dari data di atas, maka dapat dilihat mayoritas penduduk Desa Tanjung Medan yang tamat SD adalah 436 atau 51,05 % kemudian tamat SMP

adalah 170 orang atau 19,90 % selanjutnya tamat SMA adalah 162 orang atau 18,96 % dan tamat perguruan tinggi adalah 86 orang atau 10,07 %.

E. Mata Pencaharaan Penduduk

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Medan adalah Petani yang pada umumnya adalah lahan tanaman yang merupakan milik mereka sendiri/pribadi. Disamping mata pencaharian sebagai petani, penduduk Desa Tanjung Medan ada juga yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kebidanan, Pedagang dan lainnya.

F. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD. Untuk lebih jelasnya mengenai Pemerintah Desa Tanjung Medan, penulis paparkan pada tabel berikut :

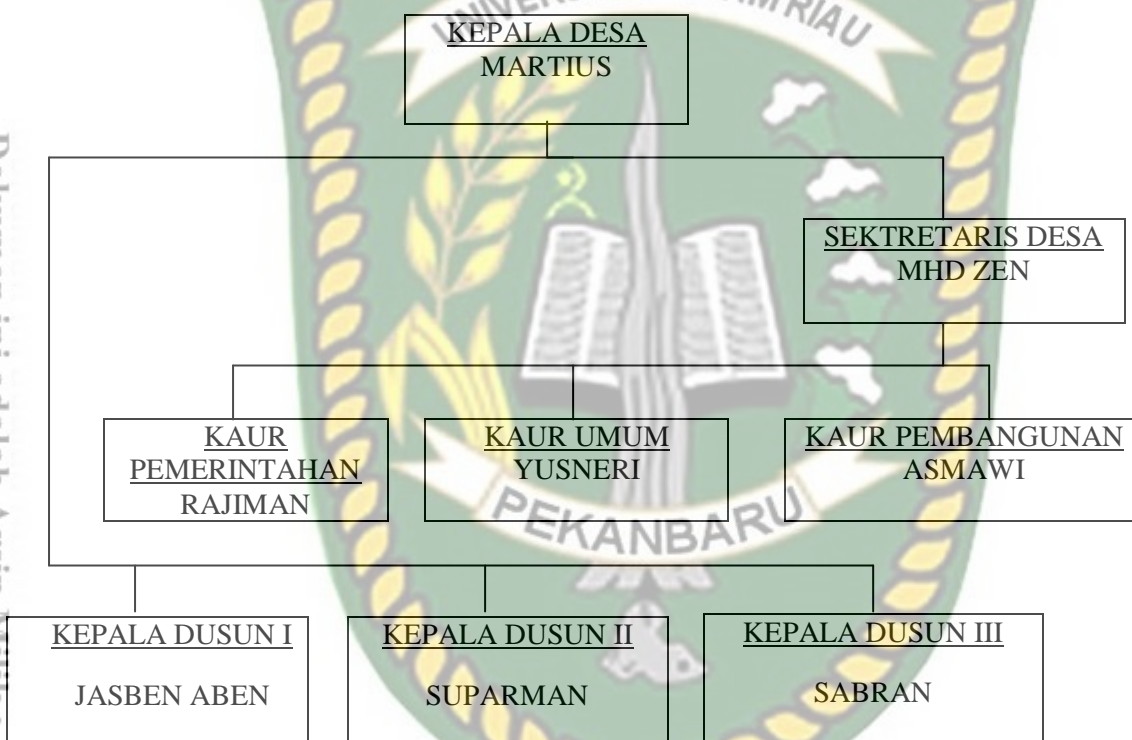
Tabel IV.3. Jumlah Pemerintah Desa Tanjung Medan

| No | Jabatan | Jumlah |
|--------|-------------------|--------|
| 1 | Kepala Desa | 1 |
| 2 | Sekretaris Desa | 1 |
| 3 | Kaur Pemerintahan | 1 |
| 4 | Kaur Umum | 1 |
| 5 | Kadus I | 1 |
| 6 | Kadus II | 1 |
| 7 | Kadus III | 1 |
| 8 | | |
| Jumlah | | 9 |

Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medan 2017

Dilihat dari tabel diatas, maka jumlah Pemerintah Desa Tanjung Medan berjumlah 9 orang yang mana mempunyai tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Tanjung Medan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV. 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Medan.



Sumber : Kantor Kepala Desa Tanjung Medan 2017

Dari tabel dan gambar diatas, maka dapat dilihat susunan serta alur kerja dari masing-masing bagian Pemerintah Desa Tanjung Medan, yang mana Kepala Desa di bantu oleh Kepala Dusun sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Desa. Sedangkan Sekretaris Desa membawahi 3 kaur, yaitu Kaur Pemerintahan, Kaur Umum, dan Kaur Pembangunan.

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memamfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjukan kuasa untuk hukum mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan per-Undang-Undang;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Memelihara kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik;
- i. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan, tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala Urusan Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur sekretariat, yang bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Tugas Kepala Urusan Pemerintahan :

- a. Membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan Pemerintahan Desa.
- b. Membantu sekretaris Desa dibidang teknis dan administratif pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- c. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa baik menyangkut rancangan Peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa.
- d. Mengajukan pertimbangan kepada Kepala Desa menyangkut urusan perselisihan masyarakat.
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap Tahun.

d. Kepala Urusan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Kepala Desa menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan. Tugas Kepala Urusan Pembangunan, meliputi :

- a. Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif Pelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa.
- b. Membantu membina perekonomian Desa.
- c. Mengajukan pertimbangan kepada kepala Desa baik menyangkut rancangan peraturan Desa maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan Desa.
- d. Penggalian dan pemanfaatan potensi Desa.
- e. Pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat Desa.
- f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka membina perekonomian Desa dan inventarisasi potensi Desa.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- h. Pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan masyarakat Desa.

e. Kepala Urusan Umum

Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggung jawab kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa. Tugas Kepala Urusan Umum :

- a. Membantu kepala Desa dibidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum.
- c. Memelihara dan melestarikan aset-aset pemerintah.
- d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan.
- e. Membina Dan melayani administrasi kependudukan.
- f. Membina dan melayani perizinan.
- g. Pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
- h. Pelaksanaan inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di Desa.
- i. Pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya Desa.

f. Kepala Dusun

Kepala Dusun adalah unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa. Kepala Dusun sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya.

Tugas Kepala Dusun :

- a. Melaksanakan keputusan dan kebijaksanaan Kepala Desa.
- b. Membina dan meningkatkan swadaya atau peran serta masyarakat dan budaya kegotong-royongan.

- c. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi program pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah di wilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

g. Badan Permusyawaratan Desa

jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Medan berjumlah 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar IV.2. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Tanjung Medan.

| No | jabatan | jumlah |
|--------|-------------|--------|
| 1 | Ketua | 1 |
| 2 | Wakil ketua | 1 |
| 3 | Anggota | 3 |
| Jumlah | | 5 |

Sumber : *Kantor Desa Tanjung Medan 2017*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Tanjung Medan berjumlah 5 orang. Yaitu terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD.

BAB V

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti mengambil data melalui instrument penelitian yaitu Kuesioner, wawancara, observasi dan yang dilakukan melalui pengisian Kuesioner oleh responden penelitian dan wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Medan serta tinjauan penelitian pada lokasi penelitian dengan melihat kegiatan yang sedang atau telah berlalu, yang mana kesemuanya dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan penelitian. Adapun data yang peneliti dapatkan dari responden penelitian yaitu Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tanjung Medan yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian terhadap seluruh responden yang digunakan sebagai sampel, maka pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran Kuesioner serta wawancara dan observasi yang akan dijelaskan pada bab ini.

Identitas responden berguna untuk mengetahui berapa banyak responden, jenis kelamin, usia dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dalam penelitian sehingga dapat lebih memperjelas mengetahui hasil penelitian. Untuk jelasnya identitas responden Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. V.1. Distribusi Jenis Kelamin Responden Pemerintah Desa

| No | Jenis Kelamin | Populasi | Persentase |
|--------|---------------|----------|------------|
| 1 | Laki-laki | 12 | 95% |
| 2 | Perempuan | 1 | 5% |
| Jumlah | | 13 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam penelitian ini responden Pemerintahan Desa yang terdiri dari perangkat Desa, Kadus, serta BPD lebih banyak di dominasi oleh Laki-laki yaitu berjumlah 12 orang atau 95% dan wanita yang berjumlah 1 orang atau 5%. Selanjutnya distribusi responden masyarakat Desa Tanjung medan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. V.2. Distribusi Jenis Kelamin Responden Masyarakat Desa Tanjung Medan

| No | Jenis Kelamin | Populasi | Persentase |
|--------|---------------|----------|------------|
| 1 | Laki-laki | 34 | 68% |
| 2 | Perempuan | 16 | 32% |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Sumber : Data Penelitian 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada responden masyarakat Desa Tanjung Medan di dominasi oleh Jenis Kelamin Laki-laki yang berjumlah 34 orang atau 68% wanita 16 orang atau 32%. Untuk selanjutnya pengelompokan responden penelitian berdasarkan Umur atau usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V. 3. Distribusi Responden penelitian Pemerintah Desa berdasarkan Umur

| No | Umur | Populasi | Persentase |
|--------|-------------|----------|------------|
| 1 | 30-39 tahun | 7 | 54% |
| 2 | 40-49 tahun | 6 | 46% |
| Jumlah | | 13 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Tingkat kematangan Umur sangat mempengaruhi jawaban responden dalam sebuah penelitian, dapat diketahui bahwa umur juga mempengaruhi pengalaman seorang dalam beraktivitas pada lingkungannya, begitu dalam berorganisasi, untuk itu peneliti mengelompokkan responden menjadi 3 kelompok umur. Dari tabel diatas terlihat bahwa 13 atau 43,33% berada pada kelompok umur 30 sampai dengan 39 tahun, 16 atau 53,33% berada pada kelompok umur 40 sampai dengan 49 tahun, terakhir 1 orang atau 3,33% berada pada kelompok umur diatas 50 tahun. Selanjutnya untuk distribusi responden masyarakat berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4. Distribusi Responden Penelitian Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Umur

| No | Umur | Populasi | Persentase |
|--------|-------------|----------|------------|
| 1 | < 29 tahun | 9 | 18% |
| 2 | 30-39 tahun | 16 | 32% |
| 3 | 40-49 tahun | 19 | 38% |
| 4 | >50 tahun | 6 | 12% |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa 9 atau 18% berada pada kelompok umur < 29 tahun, 16 orang atau 32% berada pada kelompok umur 30 sampai dengan 39 tahun, 19 orang atau 38% berada pada kelompok umur 40 sampai dengan 49 tahun terakhir 6 orang atau 12% berada pada kelompok umur diatas 50 tahun.

Pendidikan merupakan salah satu kriteria yang akan ditetapkan untuk dapat melihat tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam sebuah penelitian maka juga ditentukan juga pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden penelitian juga. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran

yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan penelitian ini pendidikan responden merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi.

Tingkat pendidikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang digolongkan dalam tingkat pendidikan yang akan dipaparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5. Distribusi Responden Pemerintah Desa Tanjung Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Populasi | Persentase |
|--------|--------------------|----------|------------|
| 1 | SD | 1 | 8% |
| 2 | SMP | 4 | 30% |
| 3 | SMA | 8 | 62% |
| Jumlah | | 13 | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari data diatas terlihat bahwa pada responden pemerintah desa didominasi oleh tingkat pendidikan Sekolah Menengah atas (SMA) berjumlah 8 orang atau 62% untuk tingkat pendidikan SMP berjumlah 4 responden atau 30%, untuk tingkat pendidikan Sekolah dasar berjumlah 1 orang atau 8%. Sehingga jika dilihat dari tingkatan pendidikan responden Pemerintah Desa Tanjung Medan dalam kategori cukup memadai.

Selanjutnya untuk distribusi responden masyarakat berdasarkan tingkatan pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.6. Distribusi Responden Masyarakat Desa Tanjung Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat pendidikan | Populasi | Persentase |
|--------|--------------------|----------|------------|
| 1 | SD | 10 | 20% |
| 2 | SMP | 8 | 16% |
| 3 | SMA | 24 | 48% |
| 4 | DIPLOMA | 3 | 6% |
| 5 | SARJANA | 5 | 10% |
| Jumlah | | 50 | 100% |

Sumber : Data Penelitian 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden masyarakat didominasi oleh tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 24 orang atau 48%, selanjutnya tingkatan sekolah dasar sebanyak 10 orang atau 20% kemudian tingkatan pendidikan SMP yang berjumlah 8 orang atau 16%, selanjutnya untuk Sarjana berjumlah 5 responden atau 10%, kemudian Diploma berjumlah 3 responden atau 6%.

B. Hasil Penelitian

Pemerintah desa adalah dibentuk oleh pemerintah secara berpartisipasi dan berjenjang untuk membantu pemerintah pusat dalam menjalankan tugas yang bersifat kenegaraan yang telah ditentukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, pemerintah dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam Negara Indonesia yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan seperti halnya Negara yang masih menjunjung hak dan kebudayaan daerah itu sendiri, pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan Kepala Desa.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa ialah membina kehidupan masyarakat Desa, yang mana membina ialah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keadaan masyarakat Desa menjadi lebih baik dan maju. Khususnya di Desa Tanjung Medan Kepala Desa melakukan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya dengan cara melakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung kehidupan masyarakat Desa menjadi lebih baik.

Dalam melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat Desa, Kepala Desa dapat melakukan pengarahan terhadap Perangkat Desa dan pelaksana kegiatan yang

ditunjuk termasuk masyarakat, melakukan pengawasan atas kegiatan yang telah dilakukan, melakukan penilaian dan perbaikan kegiatan serta laporan hasil kegiatan kepada BPD dan masyarakat.

Setelah menyebarkan angket (Kuesioner) kepada responden penelitian yang terdiri dari perangkat Desa dan masyarakat Desa Tanjung Medan, maka selanjutnya setelah angket tersebut diisi oleh responden selanjutnya peneliti mengolah data tersebut, melakukan pengelompokan berdasarkan indikator dan item penilaian masing-masing serta akan dijelaskan berurutan perindikator dan masing-masing pembagian responden penelitian yang terdiri dari pemerintah Desa dan masyarakat Desa Tanjung Medan yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Evfektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam hal ini efektivitas yang dilakukan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa dengan cara persuasif atau bujukan dan intruktif tergantung cara yang mana yang paling efektif, tetapi tujuan utamanya adalah menuju kehidupan masyarakat Desa kearah yang lebih baik. Setelah dilakukan penyebaran Kuesioner dan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.7. Distribusi Jawaban Responden Pemerintahan Desa Tanjung Medan mengenai Efektivitas

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Ada manfaat bagi kepentingan umum | 13 (100%) | - | - | 13 |
| 2 | Melayani masyarakat dengan baik | 7 (53%) | 6 (47%) | - | 13 |
| Jumlah | | 20 | 6 | - | 26 |
| Rata-rata | | 10 | 3 | - | 13 |
| Persentase | | 77% | 23% | - | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat indikator Efektivitas yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan dalam kategori baik dengan Rata-rata 10 responden atau 77% Pemerintah Desa yang menjawab baik, dalam indikator Efektivitas terdapat 2 (dua) item penilaian yang pertama adalah ada manfaat bagi kepentingan umum , dalam hal ini Kepala Desa sudah tercapaika tugas yang dilakukan Kepala Desa dan manfaatnya bagi kepentingan umum dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat.

Jawaban responden Pemerintah Desa untuk item penilaian ada manfaat bagi kepentingan umum ialah seluruh responden Pemerintah Desa yaitu 13 responden atau 100% yang menjawab baik, dengan alasan Kepala Desa adanya memberikan manfaat bagi kepentingan umum masyarakat Desa Tanjung Medan pembinaan yang dilakukan Kepala Desa.

Kemudian untuk item penilain yang kedua yaitu melayani masyarakat dengan baik, responden yang menjawab baik sebanyak 7 atau 53% dengan alasan Kepala Desa sudah melakukan pelayanan terhadap masyarakat sudah baik, kemudian untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 6 orang atau 47%, dengan

alasan pelayanan yang sudah dilakukan Kepala Desa sudah cukup baik tetapi masih di beberapa bidang masih sedang.

Dari tanggapan responden Pemerintah Desa Tanjung Medan terlihat bahwa Kepala Desa Tanjung Medan telah melakukan Efektivitas (pencapaian) kepada perangkat Desa dan Pemerintah Desa serta masyarakat yang mana dilakukan pada saat rapat, Efektivitas (pencapaian) ini juga berarti menerangkan dan mengarahkan bagaimana seharusnya kegiatan dilakukan oleh perangkat Desa, sehingga melalui kegiatan pembinaan ini masyarakat Desa dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan dan berhasil.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden masyarakat Desa Tanjung Medan mengenai Efektivitas (pencapaian) yang dilakukan Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.8. Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Dan Ketua RT Dan RW Desa Tanjung Medan mengenai Efektivitas

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Ada manfaat bagi kepentingan umum | 36 (72%) | 14 (28%) | - | 50 |
| 2 | Melayani masyarakat dengan baik | 10 (20%) | 33 (66%) | 7 (14%) | 50 |
| Jumlah | | 46 | 47 | 7 | 100 |
| Rata-rata | | 23 | 24 | 3 | 50 |
| Persentase | | 46% | 48% | 6% | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk indikator Efektivitas (pencapaian) yang dilakukan Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Medan dalam kategori cukup baik dengan Rata-rata 24 rseponden atau

48%, untuk item penilaian pertama manfaat bagi kepentingan umum masyarakat Desa responden yang menjawab baik sebanyak 36 responden atau 76%, dengan alasan biasanya Kepala Desa mempunyai manfaat ketika adanya acara-acara Desa melalui rapat yang diselenggarakan.

Kemudian untuk jawaban cukup baik sebanyak 14 responden atau 28% dengan alasan manfaat yang diberikan Kepala Desa terhadap masyarakat masih tergolong biasa dan dengan alasan masih adanya masyarakat Desa yang tidak ikut rapat dan tidak mengetahui adanya rapat yang dilakukan Pemerintah Desa tetapi baru ini memang ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa beserta perangkat Desa.

Selanjutnya untuk item penilaian kedua mengenai melayani masyarakat dengan baik dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa, responden yang menjawab baik sebanyak 10 atau 20% dengan alasan masyarakat Desa merasa pelayanan yang dilakukan Kepala Desa sudah dirasakan baik termasuk kinerja Kepala Desa dalam membina masyarakat Desa, selanjutnya masyarakat yang menjawab cukup baik sebanyak 33 atau 66%, yang mana masih adanya masyarakat merasakan pelayanan yang dilakukan pemerintah Desa atau Kepala Desa tidak begitu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian 7 responden atau 14% yang menjawab kurang baik.

Informasi yang didapatkan dari wawancara mengenai manfaat bagi kepentingan umum yang dilakukan Kepala Desa dalam kewenangannya melalui kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa, beliau mengatakan :

“Mengenai hal yang bermanfaat untuk masyarakat Desa, saya beserta perangkat desa, dan masyarakat Desa telah membahas jenis kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dalam membina kehidupan masyarakat Desa yang

efektif, sebagai contoh adanya pembangunan gedung Paud dan Perpustakaan untuk Desa untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam rangka melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa serta pemerintah Desa dan masyarakat Desa dilakukan kepada Desa pada rapat musrenbangdes sehingga pada rapat itu dapat dibahas mengenai dan apa saja yang dilakukan dalam kegiatan yang dapat memberikan manfaat untuk kepentingan umum yang akan dilaksanakan, tentunya efektivitas (pencapaian) yang dilakukan Kepala Desa sebagai pemimpin Desa diperlukan untuk dapat mengarahkan pemerintah Desa dan masyarakat mengenai teknis secara keseluruhan kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk manfaat kepentingan umum masyarakat Desa, tetapi juga dapat dilihat partisipasi masyarakat Desa masih terlihat kurang baik, jarang nya masyarakat Desa yang datang pada rapat musrenbangdes dan kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa yang dapat bermanfaat untuk masyarakat yang dapat dicontohkan dalam bidang pendidikan.

2. Efisiensi

Efektivitas (pencapaian) dan Efisiensi (penggunaan) sangatlah berhubungan, apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita memmbayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu juga dalam hal kegiatan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa , efisisensi (penggunaan) merupakan fungsi usaha untuk hal hal apa saja yang dapat digunakan oleh Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa.

Setelah dilakukan penyebaran Kuesioner dan pengumpulan serta pengolahan Data maka didapatkan jawaban responden penelitian seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9. Distribusi Jawaban Responden Pemerintahan Desa Tanjung Medan mengenai Efisiensi

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|--|-------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Terlaksananya tugas Kepala Desa | 8 (62%) | 5 (38%) | - | 13 |
| 2 | Fasilitas Desa yang dapat dirasakan masyarakat | 8 (62%) | 5 (38%) | - | 13 |
| Jumlah | | 16 | 10 | - | 26 |
| Rata-rata | | 8 | 5 | - | 13 |
| Persentase | | 62% | 38% | - | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk indikator Efisiensi (Penggunaan) yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan dalam kategori Baik dengan Rata-rata 8 responden atau 62% Pemerintah Desa yang menjawab baik, dalam indikator Efisiensi terdapat 2 item penilaian yang pertama adalah terlaksananya tugas Kepala Desa, dalam hal ini Kepala Desa memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan tugasnya sebagai Kepala Desa daalm hal melakukan pembinaan kehidupan terhadap masyarakat Desa dengan melaksanakan peraturan yang ada.

Jawaban responden Pemerintah Desa untuk item penilaian terlaksannya tugas Kepala Desa ialah seluruh responden Pemerintah Desa yaitu 8 responden atau 62% yang menjawab baik, dengan alasan Kepala Desa ada melakukan tugasnya dengan baik sebagai Kepala Desa seperti Kepala Desa sering aktif dalam berbagai kegiatan di Desa, dan untuk yang menjawab cukup baik yaitu sebanyak 5 responden atau 38%.

Kemudian untuk item penilaian yang kedua yaitu fasilitas Desa yang dapat dirasakan masyarakat yang menjawab baik sebanyak 8 responden atau 62% dengan

alasan fasilitas yang ada sudah dapat dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Desa dengan baik, kemudian untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 5 responden atau 38%, dengan alasan dalam kehidupan sehari-hari di Desa Tanjung Medan cukup baik fasilitas yang sudah dapat dirasakan masyarakat Desa.

Dari tanggapan responden Pemerintah Desa terlihat bahwa Kepala Desa Tanjung Medan telah melakukan Efisiensi (penggunaan) nya kepada perangkat Desa serta masyarakat Desa dalam melakukan pembinaan kehidupan terhadap masyarakat Desa yang mana dengan cara melakukan tugas-tugas sebagai Kepala Desa dengan baik terhadap kepentingan masyarakat melalui memberikan fasilitas kepada masyarakat Desa yang membutuhkan fasilitas-fasilitas Desa.

Selanjutnya untuk melihat jawaban dan tanggapan responden masyarakat Desa Tanjung Medan mengenai Efisiensi (Penggunaan) yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Dan Ketua RT Dan RW Desa Tanjung Medan mengenai Efisiensi

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|--|-------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Terlaksananya tugas Kepala Desa | 28 (56%) | 18 (36%) | 4 (8%) | 50 |
| 2 | Fasilitas Desa yang dapat dirasakan masyarakat | 12 (24%) | 27 (54%) | 11 (22%) | 50 |
| Jumlah | | 40 | 45 | 15 | 100 |
| Rata-rata | | 20 | 23 | 7 | 50 |
| Persentase | | 40% | 46% | 14% | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk indikator Efisiensi (penggunaan) yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa Tanjung Medan dalam kategori Cukup Baik dengan Rata-rata 23 responden atau

46% masyarakat Desa menjawab Cukup Baik, untuk item penilaian pertama yaitu terlaksananya tugas Kepala Desa responden masyarakat yang menjawab Baik sebanyak 28 responden atau 56%, dengan alasan biasanya terlaksana tugas Kepala Desa terlihat ketika pertemuan dengan Kepala Desa. Kemudian untuk jawaban Cukup baik sebanyak 18 responden atau 36% dengan alasan masih adanya tugas Kepala Desa yang belum terlaksana dengan baik, seperti adanya masyarakat yang tidak mengetahui adanya rapat Desa karena tidak adanya undangan dari pemerintah Desa, serta yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 8%.

Selanjutnya untuk item penilaian yang kedua mengenai fasilitas Desa yang dapat dirasakan masyarakat Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa, responden yang menjawab Baik sebanyak 12 responden atau 24%, selanjutnya masyarakat yang menjawab Cukup Baik sebanyak 27 responden atau 54%, dengan alasan yang mana masih adanya yang tidak dapat merasakan fasilitas-fasilitas Desa dengan Baik serta masih adanya seperti Sumur umum ketika musim kemarau kekeringan air. Kemudian responden yang menjawab kurang baik sebanyak 11 responden atau 22%

Efisiensi (penggunaan) merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin didalam suatu organisasi khususnya di Desa Tanjung Medan untuk memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa berjalan baik, tetapi sebagai anggota organisasi Desa, masyarakat dan lembaga lainnya. Kepala Desa sebagai Penggerak roda pemerintahan di Desa sehingga seharusnya dapat memenuhi kehidupan masyarakat Desa dengan baik dengan melaksanakan tugas Desa dengan baik dan menyediakan Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan masyarakat Desa. Sehingga dari keseluruhan jawaban responden masyarakat Desa dapat dilihat bahwa untuk Indikator Efisiensi dalam kategori cukup baik.

Informasi yang didapatkan dari wawancara mengenai melayani tugas Kepala Desa dengan baik, dengan Kepala Desa Tanjung Medan yaitu Bapak Martius mengatakan :

“Tugas-tugas yang saya lakukan sebagai Kepala Desa tentunya sudah berjalan baik yang mana yang sudah saya lakukan mempunyai manfaat, seperti saya melakukan pembangunan fasilitas-fasilitas untuk keperluan masyarakat Desa”.

3. Kecukupan.

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan masih berhubungan dengan Efektivitas dengan mengukur dan memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga dalam hal ini Kepala Desa dapat melakukan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku didalam peraturan tentang Desa.

Maka Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa serta memiliki kewenangan dalam membina kehidupan masyarakat Desa menjadi suatu hal yang penting untuk melihat hasil dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan sehingga dari hal tersebut dapat diadakan perbaikan untuk kegiatan yang selanjutnya dilakukan.

Setelah dilakukan penyebaran Kuesioner dan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden dari pemerintahan Desa penelitian seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.11. Distribusi Jawaban Responden Pemerintahan Desa Tanjung Medan mengenai Kecukupan

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|---|-------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepala Desa | 3 (23%) | 8 (62%) | 2 (15%) | 13 |
| 2 | Seberapa besar pengaruh Kepala Desa bagi masyarakat | 8 (62%) | 5 (38%) | - | 13 |
| Jumlah | | 11 | 13 | 2 | 26 |
| Rata-rata | | 5 | 7 | 1 | 13 |
| Persentase | | 39% | 54% | 7% | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk indikator Kecukupan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan dengan kategori Cukup Baik dengan Rata-rata 7 responden atau 54% Pemerintah Desa yang menjawab Cukup Baik, dalam Indikator Kecukupan terdapat 2 item penilaian yang pertama adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepala Desa, dalam hal ini Kepala Desa menilai kegiatan yang berkenan yang dapat dilakukan supaya berkenan bagi masyarakat dalam melakukan pembinaan kehidupan masyarakat Desa dengan melihat data dan informasi dan laporan yang didapat dari perangkat Desa.

Jawaban responden Pemerintah Desa untuk item penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepala Desa ialah 3 responden atau 23% menjawab baik, dan tidak disertai oleh alasan, selanjutnya untuk responden yang menjawab Cukup Baik sebanyak 8 responden atau 62%, kemudian untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 2 responden atau 15% dengan alasan Kebanyakan masyarakat mengatakan Kepuasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam membina

kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan tidak merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan Kepala Desa.

Kemudian untuk item penilaian Kedua yaitu seberapa besar pengaruh keberadaan Kepala Desa bagi masyarakat menjawab baik sebanyak 8 responden atau 62% dengan alasan keberadaan Kepala Desa berdampak baik bagi kehidupan di Desa Tanjung Medan. Selanjutnya untuk jawaban Cukup Baik 5 responden atau 38% dengan alasan Kepala Desa berperan penting keberadaannya di Desa Cukup Baik dalam berorganisasi maupun dalam membina kehidupan bermasyarakat.

Dari tanggapan responden Pemerintah Desa terlihat bahwa Kepala Desa Tanjung Medan telah melakukan berbagai kecukupan dengan cukup baik diketahui bahwa tindakan di bidang kecukupan untuk menilai sampai dimana suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Tanjung Medan dalam melakukan Pembinaan kehidupan Masyarakat dengan melakukan keberhasilan suatu kegiatan melalui kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa seperti Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepala Desa melalui penilaian atau pandangan dari perangkat Desa serta pengaruh Kepala Desa. Tetapi masih terlihat adanya Perangkat Desa yang merasakan Kepuasan masyarakat masih belum baik terhadap pemerintah Desa atau Kepala Desa.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden masyarakat Desa Tanjung Medan mengenai Kecukupan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.12. Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Dan Ketua RT Dan RW Desa Tanjung Medan mengenai Kecukupan

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepala Desa | 15 (30%) | 28 (56%) | 7 (14%) | 50 |
| 2 | Seberapa besar pengaruh Kepala Desa bagi masyarakat | 22 (44%) | 21 (42%) | 7 (14%) | 50 |
| Jumlah | | 37 | 49 | 14 | 100 |
| Rata-rata | | 19 | 24 | 7 | 50 |
| Persentase | | 38% | 48% | 14% | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk indikator Kecukupan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung medan dalam kategori Cukup Baik dengan Rata-rata 24 responden atau 48 % masyarakat Desa yang menjawab Cukup Baik, untuk item penilaian pertama yaitu kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepala Desa responden masyarakat yang menjawab Baik sebanyak 15 responden atau 30%, kemudian untuk jawaban Cukup Baik sebanyak 28 responden atau 56% dengan alasan masih adanya masyarakat yang belum merasakan Kepuasan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelayanan masih tergolong biasa saja seperti informasi-informasi dari pemerintah Desa masih ada yang tidak diketahui masyarakat. Serta yang menjawab Kurang Baik sebanyak 7 responden atau 14% dengan alasan tidak mengetahui pelayanan-pelayanan yang dilakukan Kepala Desa dan tidak mengetahui hal tersebut.

Untuk item penilaian kedua mengenai seberapa besar pengaruh keberadaan Kepala Desa bagi masyarakat, responden yang menjawab Baik sebanyak 22 responden atau 44%, selanjutnya masyarakat yang menjawab Cukup Baik sebanyak 21 responden atau 42%, dengan alasan Keberadaan Kepala Desa dalam membina

kehidupan masyarakat Desa Cukup Baik. Kemudian untuk masyarakat yang menjawab Kurang Baik sebanyak 7 responden atau 14% dengan alasan masyarakat tidak tersentuh dengan keberadaan Kepala Desa dan kegiatan yang dilakukan Kepala Desa tidak sampai informasinya ke masyarakat.

Masyarakat sebagai anggota organisasi yaitu Desa dapat juga melakukan penilaian terhadap kegiatan keseluruhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa agar sebagai masukan juga terhadap Pemerintah Desa apakah pembinaan yang dilakukan Kepala Desa sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh Masyarakat Desa. Seperti yang dapat diketahui tanggapan masyarakat terhadap penilaian kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat dalam kondisi Cukup Baik adapun tanggapan masyarakat yang menyatakan kondisi yang dirasakan terdapat peningkatan kondisi dari segi Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Tetapi terlihat masih adanya masyarakat yang kurang mengerti akan penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa dalam hal hasil tersebut, sehingga masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui, serta pendapat masyarakat hanya berorientasi pada hasil kegiatan, maka pendapat masyarakat dapat dikategorikan cukup baik.

Informasi yang didapatkan dari wawancara mengenai indikator Kecukupan terhadap kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat seperti kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kepala Desa dengan Kepala Desa Tanjung Medan yaitu Bapak Martius :

“Saya rasa, pelayanan yang saya lakukan sebagai Kepala Desa sudah begitu Baik, berbagai macam masalah dan persoalan sudah saya lakukan sebagaimana saya sebagai Kepala Desa, seperti pelayanan di bidang administrasi dan pemberian beberapa bantuan dari pemerintah kabupaten/provinsi/pusat sudah saya salurkan ke masyarakat dan keberadaan sayapun sebagai Kepala Desa merupakan kebutuhan yang wajib didalam kehidupan masyarakat Desa di bidang pembinaan”

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata, kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Dalam hal kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa maka kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan dan masyarakat mengetahui pembinaan yang dilakukan Kepala Desa mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka di peroleh data tentang jawaban responden mengenai Perataan. Untuk lebih jelasnya penulis paparkan pada tabel dibawah ini :

Tabel V.13. Distribusi Jawaban Responden Pemerintahan Desa Tanjung Medan mengenai Perataan

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|---|-------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Seberapa besar masyarakat yang terlayani oleh Kepala Desa | 7 (54%) | 6 (46%) | - | 13 |
| 2 | Sejauh mana masyarakat merasa manfaat pelayanan pemerintah Desa | 9 (69%) | 4 (31%) | - | 13 |
| Jumlah | | 16 | 10 | - | 26 |
| Rata-rata | | 8 | 5 | - | 13 |
| Persentase | | 62% | 38% | - | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk indikator perataan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa

Tanjung Medan dalam kategori baik dengan Rata-rata 8 responden atau 62% Pemerintah Desa yang menjawab baik, dalam indikator perataan terdapat 2 item penilaian yang pertama adalah seberapa besar masyarakat yang terlayani oleh Kepala Desa, dalam hal ini Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat Desa untuk tercapainya pembinaan kehidupan masyarakat yang baik dalam bidang pembangunan, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya secara keseluruhan dengan cara Kepala Desa berperan penting dalam kegiatan tersebut, sehingga dari situ Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat mengetahui sampai dimana perataan pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan sampai dimana keberhasilan kegiatan tersebut.

Jawaban responden Pemerintah Desa untuk item penilaian tentang seberapa besar masyarakat yang terlayani oleh Kepala Desa terlihat pada tabel diatas bahwa sebanyak 7 responden atau 54% menjawab baik dengan alasan Kepala Desa sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai peraturan yang ada, sedangkan yang menjawab cukup baik sebanyak 6 responden atau 46% dengan alasan pelayanan Kepala Desa di bidang pendidikan tergolong sudah cukup baik dengan mengajak atau meberikan bimbingan/saran kepada orang tua murid atau mapun terhadap anak-anak itu langsung yang tidak sekolah/putus sekolah supaya kembali bersekolah.

Kemudian untuk item penilian yang kedua yaitu sejauh mana masyarakat merasa manfaat pelayanan Pemerintah Desa, yang menjawab baik sebanyak 9 atau 69% dengan alasan keberadaan Kepala Desa di dalam suatu Desa sangat penting karena mempunyai manfaat di bidang pemerintahan dalam mengurus masalah pribadi maupun umum, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 4 atau 31% dengan alasan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Kepala Desa

belum maksimal karena belum memberikan manfaat keseluruhan masyarakat Desa tetapi sudah cukup baik, kemudian tidak ada responden yang menjawab Kurang baik.

Dari tanggapan responden pemerintah Desa terlihat bahwa Kepala Desa Tanjung Medan telah melakukan kewajibannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa dengan melaksanakan tugasnya supaya perataan dalam pembinaan kehidupan masyarakat Desa tidak berbeda-beda, tetapi masih dapat dilihat adanya RT/RW dan Kepala Dusun yang tidak mengetahui mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga kurangnya Fungsi anggota lain sebagai pembantu Kepala Desa dalam pengawas kekuasaan kewenangan dan kewajiban Kepala Desa.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden masyarakat Desa Tanjung Medan mengenai peratan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.14. Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Dan Ketua RT Dan Rw Desa Tanjung Medan mengenai Perataan

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Seberapa besar masyarakat yang terlayani oleh Kepala Desa | 16 (32%) | 24 (48%) | 10 (20%) | 50 |
| 2 | Sejauh mana masyarakat merasa manfaat pelayanan pemerintah Desa | 21 (42%) | 26 (52%) | 3 (6%) | 50 |
| Jumlah | | 37 | 50 | 13 | 100 |
| Rata-rata | | 19 | 25 | 6 | 50 |
| Persentase | | 38% | 50% | 12% | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk indikator perataan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam kegiatan Pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa

Tanjung Medan dalam kategori Cukup Baik dengan Rata-rata 25 atau 50% masyarakat Desa yang menjawab Cukup Baik, untuk item penilaian pertama yaitu seberapa besar masyarakat yang terlayani oleh kepala Desa, responden masyarakat yang menjawab Baik sebanyak 16 responden atau 32%, dengan alasan masyarakat merasakan pelayanan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa tergolong baik dan untuk bertemu dengan Kepala Desa dalam mengurus kepentingannya mudah untuk ditemui. Kemudian untuk jawaban cukup baik sebanyak 24 responden atau 48% dengan alasan pelayanan Kepala Desa dalam membina masyarakat di Desa Tanjung Medan masih belum begitu maksimal seperti adanya masyarakat tidak mendapatkan informasi tentang masalah Desa seperti rapat, serta yang menjawab kurang baik sebanyak 10 responden atau 20% dengan alasan tidak mengetahui hal hal pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Selanjutnya untuk item penilaian yang kedua mengenai sejauh mana masyarakat merasa manfaat pelayanan Pemerintah Desa dalam pembinaan kehidupan masyarakat Desa, responden yang menjawab baik sebanyak 21 responden atau 42%, dengan alasan manfaat pelayanan yang dilakukan oleh Kepala Desa berdampak baik seperti sudah adanya gedung Paud, selanjutnya masyarakat yang menjawab cukup baik sebanyak 26 responden atau 52% dengan alasan manfaat pelayanan yang Kepala Desa lakukan biasa saja karena hanya sebagian masyarakat yang hanya merasakannya, selanjutnya yang menjawab kurang baik sebanyak 3 responden atau 6% dengan tidak memberikan alasan.

Masyarakat sebagai anggota organisasi yaitu Desa seharusnya dapat mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Disamping itu perataan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa atau Kepala Desa agar adanya prinsip

transparansi oleh pemerintah Desa kepada masyarakat dengan demikian akan terciptanya kondisi pemerintahan yang kondusif. Tetapi masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui pelayanan masyarakat sudah berjalan baik atau belumnya dan adapun masyarakat yang mengatakan pelayanan yang dilakukan serta manfaatnya hanya biasa-biasa saja, maka jawaban dan pendapat masyarakat dapat dikategorikan Cukup Baik.

Informasi yang didapatkan dari wawancara mengenai manfaat pelayanan pemerintah Desa dalam membina kehidupan masyarakat desa dengan Kepala Desa Tanjung Medan yaitu Bapak Martius mengatakan :

“manfaat yang didapatkan masyarakat tentang pelayanan Pemerintah Desa tentu ada, seperti saya telah melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan meratakan pembangunan di setiap Dusun serta sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya di bidang pendidikan sudah adanya didirikan gedung paud dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

5. Responsivitas

Responsivitas (tanggapan) dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Suatu keberhasilan nilai kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga responsivitas (tanggapan) masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk positif dukungan wujud yang negatif berupa penolakan. Dalam hal pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa menjadi hal yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa, tanggapan-tanggapan yang dilakukan masyarakat terhadap Kepala Desa dapat berdampak baik dalam membina kehidupan masyarakat Desa.

Selanjutnya untuk melihat jawaban dan tanggapan responden Pemerintah Desa Tanjung Medan mengenai Responsivitas (tanggapan) yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.15. Distribusi Jawaban Responden Pemerintahan Desa Tanjung Medan mengenai Responsivitas

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Bertambahnya pendapatan hasil Desa | 8 (62%) | 5 (38%) | - | 13 |
| 2 | Bertambahnya fasilitas umum Desa | 4 (31%) | 9 (69%) | - | 13 |
| Jumlah | | 12 | 14 | - | 26 |
| Rata-rata | | 6 | 7 | - | 13 |
| Persentase | | 46% | 54% | - | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk indikator responsivitas yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan dalam kategori Cukup Baik dengan Rata-rata 7 responden atau 54% Pemerintah Desa yang menjawab cukup baik, dalam Indikator Responsivitas terdapat 2 item penilaian yang pertama adalah bertambahnya pendapatan hasil Desa, dalam hal ini Kepala Desa mempunyai kewajiban mengenai Responsivitas (tanggapan) tentang hal-hal yang berkaitan dengan keadaan Desa melalui pendapatan hasil Desa untuk kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa diberbagai bidang seperti, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya guna kelangsungan kebaikan Desa.

Jawaban responden Pemerintah Desa untuk item penilaian yang pertama tentang bertambahnya pendapatan hasil Desa yaitu sebanyak 8 responden atau 62%

menyatakan Baik dengan alasan selama Kepala Desa sekarang memegang kepemimpinan Desa sudah ada terlihatnya penghasilan Desa bertambah dengan bukti terlihat adanya fasilitas untuk masyarakat Desa telah ada dibangun dan tanggapan yang dilakukan Kepala Desa terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat sudah baik. Selanjutnya yang menjawab Cukup baik sebanyak 5 responden atau 38% dengan alasan mengenai pendapatan hasil Desa dalam membina kehidupan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa tergolong cukup baik, seperti adanya hasil Desa tersebut dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat Desa.

Kemudian untuk item penilaian yang kedua yaitu tentang bertambahnya fasilitas umum Desa, yang menjawab baik sebanyak 4 atau 31% responden, dengan alasan fasilitas yang dirasakan sudah dapat dipakai oleh masyarakat Desa untuk kepentingan bersama, selanjutnya yang menjawab Cukup Baik sebanyak 9 responden atau 69%, dengan alasan Fasilitas-fasilitas yang digunakan Masyarakat Desa masih terdapat kekurangannya di beberapa bagian, seperti pihak penjaga Puskesmas atau Bidan Desa yang sering tidak ada di tempat.

Dari tanggapan Responden Pemerintah Desa terlihat masih adanya ketidakpuasan masyarakat Desa yang melihat hasil penelitian melalui Kuesioner yang disebarkan ke perangkat Desa sebagai pemerintah Desa yang memandang tanggapan-tanggapan masyarakat Desa dalam kegiatan pembinaan masyarakat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga terlihat hasil Kuesioner tergolong Cukup Baik tetapi sudah dikategorikan cukup berhasil.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden masyarakat Desa Tanjung Medan mengenai Responsivitas yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam

pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.16. Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Dan Ketua RT Dan RW Desa Tanjung Medan mengenai Responsivitas

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Bertambahnya pendapatan hasil Desa | 24 (48%) | 18 (36%) | 8 (16%) | 50 |
| 2 | Bertambahnya fasilitas umum Desa | 16 (32%) | 28 (56%) | 6 (12%) | 50 |
| Jumlah | | 40 | 46 | 14 | 100 |
| Rata-rata | | 20 | 23 | 7 | 50 |
| Persentase | | 40% | 46% | 14% | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk Indikator Responsivitas yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan Kepala desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa dalam kategori Cukup Baik dengan Rata-rata 23 responden atau 46% masyarakat Desa yang menjawab Cukup Baik, untuk penilaian pertama tentang bertambahnya pendapatan hasil Desa sebanyak 24 responden atau 48% yang menjawab Baik, dengan alasan terlihat adanya pembangunan di Desa untuk masyarakat Desa dengan pendapatan hasil Desa tersebut, kemudian untuk yang menjawab Cukup Baik sebanyak 18 atau 36% responden, alasannya masyarakat ada melihat pembangunan di Desa dengan pendapatan hasil Desa melalui dana dari pusat. Sedangkan yang menjawab Kurang Baik sebanyak 8 atau 16% responden dengan alasan tidak mengetahui penghasilan Desa tersebut.

Untuk item penilaian yang kedua mengenai bertambahnya fasilitas umum Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa atau Kepala Desa, responden yang menjawab baik sebanyak 16 atau 32%, alasannya sudah merasakan fasilitas Desa tersebut. Selanjutnya yang menjawab Cukup Baik sebanyak 28 atau 56% dengan

alasan sebagiann masyarakat sudah merasakannya seperti fasilitas dibidang pendidikan contohnya adanya Paud yang berada di desa, yang menjawab kurang baik sebanyak 6 atau 12% dengan alasan terlihat pada rapat Desa yaitu masih adanya masyarakat tidak mempunyai tempat duduk atau kursi yang tidak cukup dalam rapat sehingga memaksa adanya masyarakat berdiri saat rapat dan ada juga masyarakat yang pulang/tidak ikut rapat.

Dalam hal responsivitas (Tanggapan) dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa membina kehidupan masyarakat Desa, tetapi nyatanya Kepala Desa belum melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Disamping menggunakan Kuesioner, peneliti juga melakukan observasi di lapangan untuk menambah pengumpulan data. Adapun hasil observasi tersebut mengenai responsivitas (tanggapan), ditandainya adanya fasilitas desa masih tergolong sedikit atau masih membutuhkan beberapa aspek seperti tidak adanya rumah kebudayaan adat serta tidak adanya berjalan suatu kesenian adat atau budaya di Desa Tanjung Medan sehingga organisasi dalam bidang budaya adat dan kehidupan bersosial di masyarakat tidak ada.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tanjung Medan Bapak Martius mengenai bertambahnya pendapatan hasil Desa dalam membina kehidupan masyarakat adalah :

“hasil Desa di desa setiap tahunnya ada peningkatan tetapi tidak begitu baik peningkatannya hasil pendapatan tersebut di dapat dari bantuan dari pihak kecamatan,kabupaten,provinsi dan pusat sedangkan yang berasal dari Desa tersebut tergolong rendah, maka karena oleh karena itu pembangunan tidak maksimal”

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dianalisa yang telah dilakukan peneliti dari tabel per sub indikator yang berasal dari hasil Kuesioner serta hasil

wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Medan dapat ditarik kesimpulannya dalam indikator Responsivitas dikategorikan Cukup Baik.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya, misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis. Dalam hal ini Kepala Desa mempunyai kewenangan tentang pelaksanaan pembinaan kehidupan masyarakat Desa untuk melakukan ketepatan atau sasaran yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka diperoleh data tentang jawaban responden tentang responsivitas, untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.17. Distribusi Jawaban Responden Pemerintahan Desa Tanjung Medan mengenai Ketepatan

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|---|-------------------|------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Tercapainya target yang sudah direncanakan | 5 (39%) | 6 (46%) | 2 (15%) | 13 |
| 2 | Direncanakan seberapa besar nilai guna dari target yang sudah dicapai | 4 (31%) | 7 (54%) | 2 (15%) | 13 |
| 3 | Tindakan perbaikan | 5 (38%) | 7 (54%) | 1 (8%) | 13 |
| Jumlah | | 14 | 20 | 5 | 26 |
| Rata-rata | | 5 | 6 | 2 | 13 |
| Persentase | | 39% | 46% | 15% | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk indikator kecukupan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa membina kehidupan

masyarakat di Desa Tanjung Medan dalam kategori Cukup Baik dengan Rata-rata 6 responden atau 46% Pemerintah Desa yang menjawab Cukup Baik, dalam indikator ketepatan terdapat 3 item penilaian yang pertama adalah tercapainya target yang sudah direncanakan, dalam hal ini Kepala Desa memiliki kewenangan dan kewajiban menjalankan fungsinya sebagai Kepala Desa untuk mencapai target yang direncanakannya dalam membina kehidupan masyarakat dan tepatnya sasaran arah target tersebut sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat.

Jawaban responden Pemerintah Desa untuk item penilaian pertama tercapainya target yang sudah direncanakan yang menjawab baik sebanyak 5 responden atau 39% dengan alasan Kepala Desa telah melakukan tugasnya dan target-target yang direncanakan terlaksana dengan baik, kemudian yang menjawab cukup baik sebanyak 6 atau 46% responden dengan alasan masih adanya target-target yang belum dicapai sehingga kurangnya kinerja atau tugas yang dilakukan kepala desa serta Koordinasi dengan Perangkat Desa masih belum maksimal dan yang menjawab kurang baik sebanyak 2 atau 15% responden dengan tidak memberikan alasan.

Untuk item penilaian kedua mengenai direncanakan seberapa besar nilai guna dari target yang sudah dicapai, responden yang menjawab baik sebanyak 4 atau 31% dengan alasan target yang dilakukan oleh Kepala Desa sudah tepat dan dapat digunakan untuk kepentingan bersama dan mempunyai dampak di dalam membina kehidupan masyarakat Desa, dan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 7 atau 54 responden, dengan alasan masih adanya dalam melaksanakan tugasnya di Desa, Kepala Desa tergolong dalam pembangunannya ada yang tidak tepat waktu. Responden yang menjawab Kurang Baik sebanyak 2 responden atau 15% dengan alasan target masih ada yang tidak tepat sasaran.

Untuk item penilaian yang ketiga tentang tindakan perbaikan, responden Pemerintah Desa yang menjawab baik sebanyak 5 atau 38% responden, dengan alasan tindakan perbaikan yang dilakukan Kepala Desa seperti perbaikan pembangunan seperti fasilitas di Desa alat-alat kantor dan lainnya sudah baik, selanjutnya responden yang menjawab cukup baik sebanyak 7 atau 54% dengan alasan perbaikan yang dilakukan oleh Kepala Desa masih ada tidak tepat waktu sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Kepala Desa, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 1 responden atau 8% tidak mencantumkan alasan.

Dari tanggapan responden Pemerintah Desa terlihat bahwa Kepala Desa Tanjung Medan telah melakukan ketepatan dengan Cukup Baik dalam kewenangan Kepala Desa membina kehidupan masyarakat Desa, dengan cara Kepala Desa melakukan Pembangunan dengan lokasi yang dibutuhkan masyarakat Desa dan telah melakukan tugas dan fungsinya dengan cukup baik, tetapi masih ada terlihat adanya ketidak kompak melihat dari hasil pengisian Kuesioner di dalam pemerintahan Desa sehingga tugas yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak berjalan dengan Baik dan terlihat masih kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa, tetapi kinerja Kepala Desa menurut pandangan dari perangkat Desa sudah cukup berhasil dalam melakukan pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden masyarakat Desa Tanjung Medan mengenai ketepatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa membina kehidupan Masyarakat Desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.18. Distribusi Jawaban Responden Masyarakat Dan Ketua RT Dan RW Desa Tanjung Medan mengenai Ketepatan

| No | Sub Indikator | Jawaban responden | | | Jumlah |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------|--------|
| | | Baik | Cukup baik | Kurang baik | |
| 1 | Tercapainya target yang sudah direncanakan | 14 (28%) | 25 (50%) | 11 (22%) | 50 |
| 2 | Direncanakan seberapa besar nilai guna dari target yang sudah dicapai | 14 (28%) | 24 (48%) | 12 (24%) | 50 |
| 3 | Tindakan perbaikan | 12 (24%) | 25 (50%) | 13 (26%) | 50 |
| Jumlah | | 40 | 74 | 36 | 150 |
| Rata-rata | | 14 | 24 | 12 | 50 |
| Persentase | | 28% | 48% | 24% | 100% |

Sumber : Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas terlihat untuk indikator ketepatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan Kepala Desa membina kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan dalam kategori Cukup Baik dengan rata-rata 24 responden atau 48% yang menjawab Cukup Baik, untuk item penilaian yang pertama yaitu tentang tercapainya target yang sudah direncanakan, responden yang menjawab baik sebanyak 14 atau 28% responden dengan alasan dibidang pembangunan target yang dilakukan Kepala Desa telah Baik terlihat adanya pembangunan di Desa, sedangkan yang menjawab Cukup Baik sebanyak 25 atau 50% responden dengan alasannya target yang dicapai memang cukup baik tetapi masih adanya beberapa pembangunan dan kewenangan serta tugas Kepala Desa belum selesai tepat waktu, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 11 atau 22% responden dengan alasan tidak mengetahui target yang diselesaikan oleh Kepala Desa.

Selanjutnya untuk item penilaian yang kedua tentang direncanakan seberapa nilai guna dari target yang sudah dicapai, responden masyarakat Desa yang menjawab baik sebanyak 14 atau 28% dengan alasan nilai guna dari hasil pencapaian

tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan tepat sasaran, responden yang menjawab Cukup baik sebanyak 28 atau 48% responden asalnya ialah ada manfaat dari tercapainya target yang dilakukan pemerintah Desa sehingga dapat digunakan langsung oleh masyarakat Desa, tetapi masih ada beberapa bagian yang kurang dan nilai gunanya dapat membantu pembinaan kehidupan masyarakat Desa, sedangkan responden yang menjawab Kurang baik sebanyak 12 atau 24%, tidak mengetahui nilai guna dari keberhasilan Kepala Desa tersebut.

Kemudian untuk item penilaian yang ketiga tentang tindakan perbaikan, yang mana responden yang menjawab baik sebanyak 12 atau 24% dengan alasan melihat perbaikan yang dilakukan pemerintah Desa seperti sektor perbaikan di gedung pemerintahan Desa dan pendidikan serta kesehatan, selanjutnya responden yang menjawab Cukup baik sebanyak 25 atau 50% responden alasannya ialah perbaikan yang dilakukan pihak pemerintah Desa memang ada tetapi tidak begitu maksimal, dan yang menjawab kurang baik sebanyak 13 atau 26% responden dengan alasan tidak mengetahui apakah Kepala Desa telah melakukan tugasnya dengan melakukan perbaikan yang belum tercapai.

Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa seharusnya dapat melaksanakan tugas dengan baik serta dapat melakukan kewenangannya sehingga dapat melaksanakan pembinaan kehidupan masyarakat dengan baik, tetapi dari hasil Kuesioner terlihat masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui tugas kepala desa dalam ketepatan atau sasarnya dalam kehidupan pembinaan di Desa serta masih adanya masyarakat yang masih kurang puas dengan kinerja Kepala Desa terlihat dari hasil Kuesioner hampir masyarakat menilai Kepala Desa yang tergolong cukup baik saja.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Tanjung Medan Bapak Martius tentang tercapainya target yang direncanakan oleh Kepala Desa, mengatakan :

“saya telah melakukan kegiatan tentang kewajiban saya dengan baik, seperti Pembangunan selesainya tepat waktu dan jika ada yang kurang baik dalam pembangunan seperti adanya pemasangan yang kurang baik atau pengecatan yang kurang rata serta seperti pada jalan seminisasi kami dari pihak Pemerintahan Desa bertanggung jawab memperbaikinya”.

Kemudian untuk melihat secara keseluruhan mengenai jawaban responden secara keseluruhan dibuatlah tabel rekapitulasi jawaban dengan tujuan untuk melihat keseluruhan jawaban responden yang menyimpulkan jawaban responden dan tanggapan responden penelitian yang terdiri responden Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Tanjung Medan, yang pertama adalah rekapitulasi responden Pemerintah Desa Tanjung Medan seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : V. 19. Rekapitulasi Jawaban Responden Pemerintahan Desa Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

| No | Indikator | Kategori Ukuran % | | | Jumlah % |
|------------|---------------|-------------------|------------|-------------|----------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Efektivitas | 10 (77%) | 3 (23%) | - | 13 |
| 2 | Efisiensi | 8 (62%) | 5 (38%) | - | 13 |
| 3 | Kecukupan | 5 (39%) | 7 (54%) | 1 (7%) | 13 |
| 4 | Perataan | 8 (62%) | 5 (38%) | - | 13 |
| 5 | Responsivitas | 6 (46%) | 7 (54%) | - | 13 |
| 6 | Ketepatan | 5 (39%) | 6 (46%) | 2 (15%) | 13 |
| Jumlah | | 42 | 33 | 3 | 78 |
| Rata-rata | | 7 | 5 | 1 | 13 |
| Persentase | | 54% | 39% | 7% | 100% |

Sumber : Data Penelitian,2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa jawaban responden Pemerintah Desa yang menjawab Baik sebanyak dengan Rata-rata 7 responden atau 54%, dan selanjutnya yang menjawab Cukup Baik dengan Rata-rata 5 responden atau 39% serta untuk responden yang menjawab Kurang Baik dengan rata-rata 1 responden atau 7%.

Dari tabel diatas tersebut dapat diketahui bahwa jawaban responden Pemerintah Desa tentang pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori Baik.

Kategori baik ini memiliki arti bahwa Kepala Desa telah melakukan pelaksanaan kewenangan serta tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai ketentuannya sebagai Kepala Desa yang mana diukur dengan indikator Evaluasi yaitu melakukan Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Dari keenam Indikator tersebut jawaban terlihat dari hasil penyebaran Kuesioner yang peneliti sebarkan kepada Responden Pemerintah Desa Tanjung Medan yang terdiri dari Perangkat Desa, BPD, Kepala Dusun, didapatkan secara keseluruhan dengan kategori baik.

Selanjutnya untuk melihat jawaban Responden Masyarakat Desa Tanjung Medan mengenai Evaluasi pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : V. 20.Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Desa Dan ketua RT Dan RW Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

| No | Indikator | Kategori Ukuran % | | | Jumlah % |
|------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|----------|
| | | Baik | Cukup Baik | Kurang Baik | |
| 1 | Efektivitas | 23 (46%) | 24 (48%) | 3 (6%) | 50 |
| 2 | Efisiensi | 20 (40%) | 23 (46%) | 7 (14%) | 50 |
| 3 | Kecukupan | 19 (38%) | 24 (48%) | 7 (14%) | 50 |
| 4 | Perataan | 19 (38%) | 25 (50%) | 6 (12%) | 50 |
| 5 | Responsivitas | 20 (40%) | 23 (46%) | 7 (14%) | 50 |
| 6 | Ketepatan | 14 (28%) | 24 (48%) | 12 (24%) | 50 |
| Jumlah | | 115 | 143 | 42 | 300 |
| Rata-rata | | 20 | 23 | 7 | 50 |
| Persentase | | 40% | 46% | 14% | 100% |

Sumber : Data Penelitian,2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa jawaban responden Masyarakat Desa yang menjawab baik dengan Rata-rata 20 responden atau 40%, selanjutnya untuk responden yang menjawab Cukup Baik dengan Rata-rata 23 responden atau 46% serta responden yang menjawab Kurang Baik sebanyak 7 responden atau 14%. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jawaban responden masyarakat tentang evaluasi pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dalam kategori Cukup Baik.

Kategori cukup baik ini memiliki arti bahwa Kepala Desa telah melakukan kewenangan dengan Cukup baik dan sesuai dengan ketentuannya sebagai Kepala Desa yang mana diukur dengan indikator Evaluasi yaitu melakukan Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, dari keenam indikator

tersebut dilihat kemudian jawaban responden masyarakat didapatkan jawaban keseluruhan dalam kategori cukup baik, masih adanya ketidak ikut rapat serta masyarakat dalam kegiatan dan dalam rapat menjadi hambatan pelaksanaan pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan, masyarakat hanya berorientasi kepada hasil kegiatan yang didapatkan dari tanggapan masyarakat cukup baik.

Dari hasil rekapitulasi jawaban responden Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa serta Ketua RT dan Rw dapat dikategorikan cukup Baik berarti keseluruhan kewenangan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa yang terdiri dari pembinaan kepada pemerintah Desa dan masyarakat Desa, melakukan Efektivitas (pencapaian), Efisiensi (penggunaan), kecukupan, perataan, responsivitas (tanggapan), dan ketepatan yang dilakukan oleh Kepala Desa telah dilakukan dengan Cukup Baik melihat dari jawaban dan tanggapan responden didapatkan hasil Cukup Baik.

Mengenai salah satu indikator evaluasi yang dilakukan Kepala Desa mengenai efektivitas (pencapaian) yang dilakukan oleh Kepala Desa, pencapaian yang dilakukan oleh Kepala Desa tentang pelaksanaan pembinaan kehidupan masyarakat Desa yaitu melalui memberikan pengarahan terhadap dengan cara rapat di Desa, seperti musrenbangdes supaya pencapaian hasil dari tugas dan wewenang Kepala Desa dapat diketahui oleh masyarakat, tetapi juga dapat dilihat partisipasi masyarakat Desa masih terlihat kurang Baik karena masih adanya masyarakat yang tidak mengikuti kegiatan tersebut.

Mengenai Efisiensi (penggunaan) yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan Masyarakat terhadap kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat Desa dengan cara Kepala Desa seharusnya dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik serta mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa, serta membuat peraturan-peraturan atau membuat tahapan-tahapan supaya terwujudnya pembinaan yang baik, maka seharusnya Kepala Desa membuat peraturan Desa sebagai pedoman pemerintah Desa masyarakat Desa dapat bertindak dalam kegiatan tersebut.

Serta Kepala Desa seharusnya dapat memberikan kecukupan kepada masyarakat Desa dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dengan cara Kepala Desa melaksanakan wewenangnya dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan cukup baiknya kinerja Kepala Desa, serta Kepala Desa dapat melakukan perbaikan pembangunan di setiap Dusun supaya terciptanya perbaikan pembangunan dalam kewenangannya melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat Desa seperti pembangunan yang memang dibutuhkan di sekitar tempat tersebut, sehingga responsivitas dari masyarakat melihat pembangunan di Desa dengan baik, dan masyarakat memandang hasil Desa dapat bertambah dengan adanya pembangunan serta akan semakin bertambahnya fasilitas di Desa dengan kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Ketepatan (tujuan) yang dilakukan oleh Kepala Desa mencapai target dengan melihat mulai meningkatnya pembangunan dibidang pendidikan seperti yang telah dibangun pemerintah Desa seperti gedung PAUD, dan tetapi di bidang budaya dan sosial tidak ada, seperti tidak adanya rumah adat yang dibutuhkan masyarakat Desa dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan adat-istiadat di Desa.

C. Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Dalam Membina Kehidupan Masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

Setelah melakukan penelitian, adapun hambatan yang diketahui dan terjadi, meliputi :

1. Jarangnya Kepala Desa berada ditempat sehingga jarangny Kepala desa untuk memberikan pengarahan tentang kegiatan yang harusnya dilakukan oleh perangkat dan masyarakat Desa.
2. Tidak adanya Kepala Desa mensosialisasikan peraturan Desa dan pengumuman mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui dan tidak mengikuti kegiatan tersebut.
3. Efisiensi atau pencapaian yang dilakukan oleh Kepala Desa hanya beberapa bagian saja tetapi belum memadai, sehingga kegiatan tidak berjalan dengan baik
4. Kurang tingginya partisipasi masyarakat Desa Tanjung Medan untuk ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa khususnya pembinaan kehidupan masyarakat.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat kegunaan dari pembinaan kehidupan masyarakat Desa.
6. Perangkat Desa serta BPD kurang bersosialisai dengan Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa sehingga tugas dan wewenang Kepala Desa tidak maksimal diselesaikan.

Dari hambatan yang diketahui yang diketahui terlihat bahwa hal ini diakibatkan oleh tidak maksimalnya pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dan kurang melaksanakan tugasnya dalam pembinaan kehidupan masyarakat Desa, seperti seringnya Kepala Desa tidak ada di tempat dan Kepala Desa tidak mensosialisasikan kegiatan yang dilaksanakan, kemudian kurang terlaksananya Efektivitas atau pencapaian yang dilakukan oleh Kepala Desa, serta hambatan yang datang dari masyarakat ialah kurangnya tingkat partisipasi yang dimiliki oleh

masyarakat, maka dari itu penting keaktifan dari dua pihak ini untuk mensukseskan pelaksanaan pembinaan kehidupan masyarakat Desa di Desa Tanjung Medan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Admosudirdjo. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Graha Indonesia. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Awang, Azam, Wijaya, Mendra, 2012. *Ekologi pemerintahan*.
- Badudu, J.S, 2001. *Kamus umum bahasa indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Boediningsih, Wydiawati. 2010. *Hak Azazi Manusia Dan Kewarganegaraan*. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Surabaya.
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Rineka Cipta. Bengkulu.
- Daryanto, Abdullah, 2013. *Pengantar ilmu manajemen dan komunikasi*. Prestasi pustaka. Jakarta.
- Dharma, Setiawan, Salam. 2002. *Otonomi daerah dalam prespektif lingkungan, nilai dan sumber daya*. Jakarta, Djembatan
- Dunn, William, 2003. *Analisis kebijakan public*. Yogyakarta. Gadjahmada press
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan budaya Indonesia*, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan peradilan Administrasi terhadap tindakan pemerintah*. UGM press. Yogyakarta.
- Gedeian, Arthur G. 1991. *University Of Colorado At Denver*.

- Handjon, Philipus. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. UGM press. Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Manajemen dasar, pengertian dan masalah*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan publik*. Yogyakarta. Gaya media.
- Irfan, Muhammad, 2006. *Akuntabilitas Dan Good Governance*. Jakarta : Departemen Agama RI, Sekretariat Jendral, Biro Organisasi Dan Tatalaksana.
- Labolo, Muhadam, 2011. *Dinamika demokrasi, politik dan pemerintahan daerah*. Jakarta. Pt Indeks Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. WPP AMP YKPN. Yogyakarta Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. WPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Manullang. 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BFPE, Yogyakarta
- Manullang. 2009. *Manajemen*. Gajah Mada University. Press. Yogyakarta.
- Marbun, 2011. *Pengadilan Adiminstrasi Negara dan upaya*. UII press. Yogya.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. WPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Muchsin, H dan Fadillah Putra, 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Averroes. Malang.
- Musanef. 2000. *Manajemen kepegawaian di indonesia*. Jakarta: Haji masagung
- Ndraha, Talizuduhu, 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Ndraha, Talizuduhu, 2005. *Kybernologi*. Jakarta, rineka cipta.
- Ndraha, Talizuduhu, 2010. *Kybernologi sebagai sebuah rekontruksi ilmu pemerintahan*. Jakarta, rineka cipta.

- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Pranadjaja, M. Rohidin. 2003. *Hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan*. Gramedia Fustaka. Jakarta
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit djambatan
- Siagian, P. Sondang. 2002. *Fungsi-Fungsi Manejerial*. Jakarta. Rineka cipta.
- Simamora, Hary, 2004. *Manajemen sumber daya manusia*. STIE YKPN. Yogyakarta
- Sandjaja, herianto. 2006. *Panduan Penelitian*. Prestasi pustaka. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Soekarno, K. 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta. Miswar 1986.
- Steers, Richard. M. 1985. *Efektivitas Organisasasi*. Alih Bahasa Magdalena Janim. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sukarna, 2011. *Dasar-dasar manajemen*. Mandar Maju. Bandung.
- Susanto, Astrid. S. 1975. *Pendapat Umum*. Bina Cipta. Bandung.
- Supriyanto, 2009. *Metodologi riset bisnis*. Indeks. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana 2003 *Kepemimpinan pemerintahan indonesia*. Bandung. Repika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana 2007. *Manajemen pemerintah*. Perca. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung. Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem pemerintahan indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta

Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2002. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.

The Liang Gie. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*, Yogyakarta. Liberty

Wasistiano, Sadu Dan Tahir, 2006. *Prospek pengembangan Desa*. Bandung. Focus Media

William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Winarno, Bud,i 2004. *Kebijakan publik teori, dan studi kasus*. CAPS.2012. Yogyakarta

Yusuf, Farida. 2000, *evaluasi program*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. UIR press, pekanbaru.

Dokumentasi

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Buku pedoman penyusunan usulan penelitian, hasil penelitian Universitas Islam Riau